

LAMPIRAN V : PERATURAN DAERAH KABUPATEN BLORA
NOMOR 5 TAHUN 2021
TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN BLORA TAHUN 2021-2041

INDIKASI PROGRAM KABUPATEN BLORA

NO.	PROGRAM UTAMA	LOKASI	BIAYA (JUTA RP)		WAKTU PELAKSANAAN																SUMBER DANA	INSTANSI/OPD/PIHAK PENANGGUNGJAWAB/ PELAKSANA
					PJM 1						PJM 2		PJM 3		PJM 4							
					2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	S/D	2031	2032	S/D	2036	2037	S/D	2041			
A	PERENCANAAN TATA RUANG																					
	1. Legalisasi RTRW		300															APBD		Bappeda		
B	PERWUJUDAN STRUKTUR RUANG																					
I	Perwujudan Pusat Kegiatan																					
	1. Program pengembangan Pusat Kegiatan Wilayah dan Pusat Kegiatan Lokal	▪ Kawasan perkotaan Cepu ▪ Kawasan perkotaan Blora																				
	- Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi.		500															APBD		DPUPR		
	- Penyusunan Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan.		500															APBD		Dinrumkimhub, DPUPR		
	- Pengembangan sarana dan prasarana dasar kawasan perkotaan sebagai pusat pelayanan ekonomi dan sosial		1.000															APBD		Dinrumkimhub, DPUPR		
	- Pembentukan kerjasama antara pemerintah dengan swasta untuk medukung pelaksanaan pengembangan sarana dan prasarana dasar kawasan perkotaan		1.000															APBD		Dinrumkimhub, DPUPR		
	2. Program pengembangan Pusat Pelayanan Kawasan	▪ Kawasan Perkotaan Kunduran; ▪ Kawasan Perkotaan Todanan; ▪ Kawasan Perkotaan Banjarejo; ▪ Kawasan Perkotaan Japah; ▪ Kawasan Perkotaan Bogorejo; ▪ Kawasan Perkotaan Jiken; ▪ Kawasan Perkotaan Ngawen; ▪ Kawasan Perkotaan Randublatung ▪ Kawasan Perkotaan Kradenan; dan ▪ Kawasan Perkotaan Jati.																				
	- Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi.		2.500															APBD		DPUPR		
	- Penyusunan Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan.		1.200															APBD		Dinrumkimhub, DPUPR		
	- Peningkatan prasarana dan sarana kawasan dasar kawasan perkotaan sebagai pusat pelayanan ekonomi dan sosial		1.000															APBD		Dinrumkimhub, DPUPR		
	- Pembentukan kerjasama antara pemerintah dengan swasta untuk mendukung pelaksanaan pengembangan sarana dan prasarana dasar kawasan perkotaan		1.000															APBD		Dinrumkimhub, DPUPR		
	3. Program pengembangan Pusat Pelayanan Lingkungan:	▪ Kecamatan Kradenan ▪ Kecamatan Japah																				
	- Penataan permukiman pedesaan		1.000															APBD		DPUPR, Dinrumkimhub		
	- Mendorong pertumbuhan kawasan pedesaan.		500															APBD		DPUPR, Dinrumkimhub		
	- Pembentukan kerjasama antara pemerintah dengan swasta untuk medukung pelaksanaan pengembangan sarana dan prasarana dasar kawasan perdesaan		1.000															APBD		DPUPR, Dinrumkimhub		
	- Pengembangan aksesibilitas menuju desa tertinggal		1.000															APBD		DPUPR, Dinrumkimhub		
II	Perwujudan Sistem Prasarana Transportasi																					
2.1	Peruwujudan Sistem Jaringan Transportasi Jalan																					
	1. Penyusunan rencana induk sistem transportasi	Kabupaten Blora	200															APBN APBD Prov APBD		Kementerian PUPR Dinas PUBMCK Prov DPUPR		
	2. penyusunan Rencana Induk Rencana Pembangunan Jangka Sedang (RPJM) jalan dan jembatan.	Kabupaten Blora	500															APBN APBD Prov APBD		Kementerian PUPR Dinas PUBMCK Prov DPUPR		
	3. Penyusunan Rencana Induk Detail Engineering Design (DED) dan Studi Kalayakan Jalan Lingkar Kota maupun Kabupaten	Kabupaten Blora	1.000															APBN APBD Prov APBD		Kementerian PUPR Dinas PUBMCK Prov DPUPR		
	4. Pengembangan jalan kolektor primer 1 (JKP-1) yang merupakan jalan nasional berupa ruas jalan Rembang-Blora-Cepu	▪ Kecamatan Blora ▪ Kecamatan Tunjungan ▪ Kecamatan Jepon ▪ Kecamatan Jiken ▪ Kecamatan Sambong ▪ Kecamatan Cepu	100.000															APBN		Kementerian PUPR		

NO.	PROGRAM UTAMA	LOKASI	BIAYA (JUTA RP)		WAKTU PELAKSANAAN																SUMBER DANA	INSTANSI/OPD/PIHAK PENANGGUNGJAWAB/ PELAKSANA
					PJM 1						PJM 2		PJM 3			PJM 4						
					2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	S/D	2031	2032	S/D	2036	2037	S/D	2041			
	5. Pengembangan jalan kolektor primer 2 (JKP-2) yang merupakan jalan provinsi meliputi:																					
	a. Ruas jalan Wirosari-Blora	▪ Kecamatan Kunduran ▪ Kecamatan Ngawen ▪ Kecamatan Tunjungan ▪ Kecamatan Blora	50.000															APBD Prov	Dinas PUBMCK Prov			
	b. Ruas jalan Wirosari-Kuwu-Doplang-Cepu	▪ Kecamatan Jati ▪ Kecamatan Randublatung ▪ Kecamatan Kedungtuban ▪ Kecamatan Cepu	50.000															APBD Prov	Dinas PUBMCK Prov			
	c. Ruas jalan Pati-Blora	▪ Kecamatan Todanan ▪ Kecamatan Japah ▪ Kecamatan Ngawen	50.000															APBD Prov	Dinas PUBMCK Prov			
	6. Pengembangan rencana jalan strategis kabupaten meliputi:																					
	a. Ruas jalan Blora-Randublatung-Getas-Banjarejo (Kabupaten Ngawi)	Kecamatan yang dilalui ruas jalan kabupaten	10.000															APBD Prov APBD	Dinas PUBMCK Prov DPUPR			
	b. Ruas jalan Peting-Menden-Medalem-Ngraho (Kabupaten Bojonegoro)	Kecamatan yang dilalui ruas jalan kabupaten	10.000															APBD	DPUPR			
	7. Peningkatan jalan kolektor primer 4 (JKP-4) menuju kawasan perdagangan dan jasa, industri, kawasan perbatasan, dan bandar udara	Kecamatan yang dilalui ruas jalan kabupaten	10.000															APBD	DPUPR			
	8. Pengembangan jalan lingkar meliputi:																					
	a. Kecamatan Tunjungan-Kecamatan Blora-Kecamatan Jepon	▪ Kecamatan Tunjungan ▪ Kecamatan Blora ▪ Kecamatan Jepon	20.000															APBD	DPUPR			
	b. Kecamatan Sambong-Kecamatan Kedungtuban	▪ Kecamatan Sambong ▪ Kecamatan Kedungtuban	20.000															APBD	DPUPR			
	c. Kecamatan Jepon-Kecamatan Blora-Kecamatan Banjarejo-Kecamatan Ngawen	▪ Kecamatan Jepon ▪ Kecamatan Blora ▪ Kecamatan Banjarejo ▪ Kecamatan Ngawen	20.000															APBD	DPUPR			
	9. Pengembangan dan peningkatan jalan lokal primer yang menuju kawasan perdagangan dan jasa, industri, dan kawasan perbatasan	Kecamatan yang dilalui ruas jalan kabupaten	10.000															APBD	DPUPR			
	10.Peningkatan terminal penumpang tipe A	Kecamatan Cepu	1.000															APBN	Kementerian Perhubungan			
	11.Peningkatan dan optimalisasi terminal tipe B	Kecamatan Blora	1.000															APBD Prov	Dinas Perhubungan Prov.			
	12.Pengembangan dan optimalisasi terminal tipe C di pusat-pusat pelayanan	▪ Kecamatan Ngawen ▪ Kecamatan Kunduran ▪ Kecamatan Todanan ▪ Kecamatan Randublatung	1.000															APBD	Dinrumkimhub			
	13.Peningkatan pelayanan angkutan penumpang	Tersebar di wilayah kabupaten	250															APBD	Dinrumkimhub			
	14.Rehabilitasi dan pemeliharaan prasarana dan fasilitas lalu lintas dan angkutan jalan	Tersebar di wilayah kabupaten	150															APBD	Dinrumkimhub			
	15.Pengembangan prasarana jembatan lintas provinsi	▪ Kecamatan Cepu ▪ Kecamatan Sambong ▪ Kecamatan Kradenan	100.000															APBN APBD Prov APBD	Kementerian PUPR Dinas PUBMCK Prov DPUPR			
2.2	Sistem Jaringan Transportasi Kereta Api																					
	1. Jaringan jalur kereta api antarkota																					
	a. Reaktivasi jalur Semarang-Demak-Godong-Purwodadi-Blora	Kecamatan yang dilewati oleh jalur kereta api antarkota	100.000															APBN Swasta	Kementerian Perhubungan, Penyelenggara Perkeretapian PT. KAI			
	b. Reaktivasi jalur Rembang-Blora-Cepu	Kecamatan yang dilewati oleh jalur kereta api antarkota	100.000															APBN Swasta	Kementerian Perhubungan, Penyelenggara Perkeretapian PT. KAI			
	c. Pengembangan kereta api semi cepat jalur Jakarta-Surabaya	Kecamatan yang dilewati oleh jalur kereta api antarkota	500.000															APBN Swasta	Kementerian Perhubungan, Penyelenggara Perkeretapian PT. KAI			
	2. Peningkatan dan optimalisasi stasiun kereta api	▪ Stasiun Cepu ▪ Stasiun Kapuan	100.000															APBN Swasta	Kementerian Perhubungan, Penyelenggara Perkeretapian			

NO.	PROGRAM UTAMA	LOKASI	BIAYA (JUTA RP)	WAKTU PELAKSANAAN																SUMBER DANA	INSTANSI/OPD/PIHAK PENANGGUNGJAWAB/ PELAKSANA
				2021	PJM 1					PJM 2		PJM 3			PJM 4						
					2022	2023	2024	2025	2026	2027	S/D	2031	2032	S/D	2036	2037	S/D	2041			
		<div>▪ Stasiun Wadu</div> <div>▪ Stasiun Randublatung</div> <div>▪ Stasiun Doplang</div>																		PT. KAI	
	3. Pengamanan sempadan rel kereta api	Kecamatan yang dilewati oleh jalur kereta api	5.000															APBN Swasta	Kementerian Perhubungan, Penyelenggara Perkeretapiian PT. KAI		
	4. Pembangunan dan pengembangan perlintasan tidak sebidang dan sebidang	Kecamatan yang dilewati oleh jalur kereta api	5.000															APBN Swasta	Kementerian Perhubungan, Penyelenggara Perkeretapiian PT. KAI		
2.3	Sistem Jaringan Angkutan Sungai, Danau, dan Penyeberangan																				
	1. Penyusunan rencana induk transportasi sungai	<div>▪ Kecamatan Cepu</div> <div>▪ Kecamatan Kedungtuban</div> <div>▪ Kecamatan Kradenan</div>	500															APBN APBD Prov	Kementerian PUPR BBWS		
	2. Penetapan lokasi tambatan perahu	<div>▪ Kecamatan Cepu</div> <div>▪ Kecamatan Kedungtuban</div> <div>▪ Kecamatan Kradenan</div>	1.000															APBN APBD Prov	Kementerian PUPR BBWS		
	3. Pengembangan dermaga	<div>▪ Kecamatan Cepu</div> <div>▪ Kecamatan Kedungtuban</div> <div>▪ Kecamatan Kradenan</div>	1.000															APBN APBD Prov	Kementerian PUPR BBWS		
	4. Peningkatan keamanan transportasi sungai	<div>▪ Kecamatan Cepu</div> <div>▪ Kecamatan Kedungtuban</div> <div>▪ Kecamatan Kradenan</div>	1.000															APBN APBD Prov	Kementerian PUPR BBWS		
	5. Pengembangan angkutan penyeberangan di Sungai Bengawan Solo	<div>▪ Kecamatan Cepu</div> <div>▪ Kecamatan Kedungtuban</div> <div>▪ Kecamatan Kradenan</div>	500															APBN APBD Prov	Kementerian PUPR BBWS		
2.4	Sistem Jaringan Transportasi Udara																				
	1. Pengembangan lapangan terbang Ngloram	<div>▪ Kecamatan Cepu</div> <div>▪ Kecamatan Kedungtuban</div>	5.000															APBN Swasta	Kementerian Perhubungan PT. Angkasa Pura		
	2. Perluasan landasan pacu	<div>▪ Kecamatan Cepu</div> <div>▪ Kecamatan Kedungtuban</div>	5.000															APBN Swasta	Kementerian Perhubungan PT. Angkasa Pura		
	3. Pemantapan penetapan status kepemilikan	<div>▪ Kecamatan Cepu</div> <div>▪ Kecamatan Kedungtuban</div>	500															APBN Swasta	Kementerian Perhubungan PT. Angkasa Pura		
	4. Peningkatan bandara beserta infrastruktur penunjang	<div>▪ Kecamatan Cepu</div> <div>▪ Kecamatan Kedungtuban</div>	1.000															APBN Swasta	Kementerian Perhubungan PT. Angkasa Pura		
	5. Penetapan alur penerbangan	<div>▪ Kecamatan Cepu</div> <div>▪ Kecamatan Kedungtuban</div>	1.000															APBN Swasta	Kementerian Perhubungan PT. Angkasa Pura		
III	Perwujudan Sistem Jaringan Energi																				
3.1	Jaringan Infrastruktur Minyak dan Gas Bumi																				
	1. Pengembangan depo minyak	Kecamatan Cepu	50.000															APBN Swasta	Kementerian ESDM PT. Pertamina Swasta		
	2. Pembangunan pipa gas yang melintas di sepanjang kereta api	<div>▪ Kecamatan Kradenan</div> <div>▪ Kecamatan Randublatung</div> <div>▪ Kecamatan Jati</div>	50.000															APBN Swasta	Kementerian ESDM PT. Pertamina Swasta		
	3. Pengembangan jaringan perpipaan regional Blora-Grobogan-Demak-Semarang	Kecamatan yang dilalui jaringan perpipaan regional Blora-Grobogan-Demak-Semarang	50.000															APBN Swasta	Kementerian ESDM PT. Pertamina Swasta		
	4. Jaringan pipa minyak dan gas bumi	<div>▪ Kecamatan Jiken</div> <div>▪ Kecamatan Sambong</div> <div>▪ Kecamatan Cepu</div>	50.000															APBN Swasta	Kementerian ESDM PT. Pertamina Swasta		
	5. Pengembangan jaringan yang menyalurkan gas bumi dari kilang pengolahan ke konsumen berupa distribusi jaringan gas untuk rumah tangga	<div>▪ Kecamatan Cepu</div> <div>▪ Kecamatan Kradenan</div> <div>▪ Kecamatan Kedungtuban</div>	50.000															APBN Swasta	Kementerian ESDM PT. Pertamina Swasta		
3.2	Jaringan Infrastruktur Ketenagalistrikan																				
	1. Infrastruktur pembangkit tenaga listrik berupa pembangkit listrik tenaga angin, tenaga surya, dan tenaga lainnya yang ramah lingkungan	Seluruh wilayah Kabupaten Blora	100.000																		
	2. Infrastruktur penyaluran tenaga listrik																				

NO.	PROGRAM UTAMA	LOKASI	BIAYA (JUTA RP)	WAKTU PELAKSANAAN																		SUMBER DANA	INSTANSI/OPD/PIHAK PENANGGUNGJAWAB/ PELAKSANA
				2021	PJM 1						PJM 2		PJM 3			PJM 4							
					2022	2023	2024	2025	2026	2027	S/D	2031	2032	S/D	2036	2037	S/D	2041					
	a. Pengembangan dan peningkatan jaringan transmisi tenaga listrik untuk menyalurkan tenaga listrik antar sistem																						
	1) Saluran udara tegangan ekstra tinggi (SUTET) Mandirancan-Brebes-Tegal-Pemalang-Pekalongan-Batang-Kendal-Semarang-Ungaran-Grobogan-Blora-Krian (Circuit III)	▪ Kecamatan Jati ▪ Kecamatan Randublatung ▪ Kecamatan Kradenan	50.000															APBN Swasta	Kementerian ESDM PT. PLN Swasta				
	2) Saluran udara tegangan tinggi (SUTT)	Kecamatan Blora	10.000															APBN Swasta	Kementerian ESDM PT. PLN Swasta				
	b. Pengembangan dan peningkatan jaringan distribusi tenaga listrik																						
	1) Saluran udara tegangan menengah (SUTM)	Kecamatan yang dilalui jaringan SUTM	5.000															APBN Swasta	Kementerian ESDM PT. PLN Swasta				
	2) Saluran udara tegangan rendah (SUTR)	Kecamatan yang dilalui jaringan SUTR	1.000															APBN Swasta	Kementerian ESDM PT. PLN Swasta				
	c. Pengembangan dan peningkatan gardu induk	▪ Kecamatan Blora ▪ Kecamatan Cepu																					
IV	Perwujudan Sistem Telekomunikasi																						
4.1	Pengembangan Jaringan Tetap																						
	1. Peningkatan kualitas jaringan distribusi	Seluruh wilayah Kabupaten Blora	10.000															APBD Swasta	Dinkominfo PT. TELKOM Swasta				
	2. Pengembangan jaringan internet di pusat-pusat perkotaan	Seluruh wilayah Kabupaten Blora	10.000															APBD Swasta	Dinkominfo PT. TELKOM Swasta				
4.2	Pengembangan Sistem Jaringan Bergerak																						
	Pengembangan menara telekomunikasi dengan konsep menara bersama	Wilayah Kabupaten Blora	50.000															APBD Swasta	Dinkominfo PT. TELKOM Swasta				
V	Perwujudan Sistem Sumber Daya Air																						
5.1	Sumber Air																						
	1. Peningkatan sistem kinerja Daerah Aliran Sungai	Seluruh DAS di Kabupaten Blora	100.000															APBN APBD Prov APBD	Kementerian PUPR Dinas PUSDATARU Prov DPUPR				
	2. Pelestarian sumber air dan konservasi daerah tangkapan air	Seluruh sumber air di Kabupaten Blora	100.000															APBN APBD Prov APBD	Kementerian PUPR Dinas PUSDATARU Prov DPUPR				
	3. Pembangunan, peningkatan, dan pemeliharaan waduk dan bendung	Seluruh waduk dan bendung di Kabupaten Blora	200.000															APBN APBD Prov APBD	Kementerian PUPR Dinas PUSDATARU Prov DPUPR				
	4. Pembangunan, peningkatan, dan pemeliharaan embung	Seluruh embung di Kabupaten Blora	100.000															APBN APBD Prov APBD	Kementerian PUPR Dinas PUSDATARU Prov DPUPR				
5.2	Prasarana Sumber Daya Air																						
	1. Normalisasi sungai dan saluran irigasi	Seluruh sungai dan saluran irigasi di Kabupaten Blora	100.000															APBN APBD Prov APBD	Kementerian PUPR Dinas PUSDATARU Prov DPUPR, Dintan KP				
	2. Pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi dan rawa serta jaringan pengairan lainnya	Seluruh saluran irigasi di Kabupaten Blora	5.000															APBN APBD Prov APBD	Kementerian PUPR Dinas PUSDATARU Prov DPUPR, Dintan KP				
	3. Peningkatan dan pemeliharaan prasarana jaringan irigasi	Seluruh saluran irigasi di Kabupaten Blora	5.000															APBN APBD Prov APBD	Kementerian PUPR Dinas PUSDATARU Prov DPUPR, Dintan KP				
	4. Pendayagunaan potensi mata air dan air tanah	Seluruh wilayah Kabupaten Blora	100.000															APBN APBD Prov	Kementerian PUPR Dinas PUSDATARU Prov				

NO.	PROGRAM UTAMA	LOKASI	BIAYA (JUTA RP)		WAKTU PELAKSANAAN																SUMBER DANA	INSTANSI/OPD/PIHAK PENANGGUNGJAWAB/ PELAKSANA
					PJM 1						PJM 2		PJM 3		PJM 4							
					2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	S/D	2031	2032	S/D	2036	2037	S/D	2041			
																			APBD	DPUPR		
5.3	Sistem Pengendali Banjir																					
	1. Pembangunan tanggul penahan banjir	Seluruh sungai di kawasan perkotaan Blora	5.000																APBN APBD Prov APBD	Kementerian PUPR Dinas PUSDATARU Prov DPUPR		
	2. Pembangunan <i>groundsill</i>	Seluruh bendung di kawasan perkotaan Blora	1.000																APBN APBD Prov APBD	Kementerian PUPR Dinas PUSDATARU Prov DPUPR		
	3. Perbaikan teknis sarana dan prasarana drainase	Seluruh wilayah Kabupaten Blora	2.000																APBN APBD Prov APBD	Kementerian PUPR Dinas PUSDATARU Prov DPUPR		
	4. Pengembangan kolam penampung air hujan sebagai pengendali banjir	Seluruh kawasan perkotaan	2.000																APBN APBD Prov APBD	Kementerian PUPR Dinas PUSDATARU Prov DPUPR		
	5. Pemasangan peringatan dini	Seluruh wilayah Kabupaten Blora	500																APBN APBD Prov APBD	Kementerian PUPR Dinas PUSDATARU Prov DPUPR		
	6. Pemberdayaan masyarakat	Seluruh wilayah Kabupaten Blora	500																APBD	DPUPR		
5.4	Jaringan Air Baku untuk Air Bersih																					
	1. Pembangunan instalasi pengolahan air	Kecamatan Tunjungan	1.000																APBD	DPUPR		
	2. Pembangunan jaringan air bersih perpipaan	Seluruh kawasan perkotaan di Kabupaten Blora	1.000																APBD	DPUPR Disrumkimhub		
	3. Optimalisasi pengelolaan dan pengembangan jaringan air bersih perpipaan mandiri di kawasan perdesaan	Seluruh kawasan perdesaan di Kabupaten Blora	1.000																APBD	DPUPR Disrumkimhub		
	4. Peningkatan dan pemeliharaan mata air	Seluruh mata air di Kabupaten Blora	500																APBD	DPUPR		
VI	Perwujudan Sistem Prasarana Lainnya																					
6.1	Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)																					
	1. SPAM jaringan perpipaan																					
	a. Peningkatan dan pengembangan prasarana jaringan perpipaan air minum	Wilayah Kabupaten Blora	50.000																APBD Swasta	DPUPR Dinrumkimhub PDAM		
	b. Peningkatan kualitas air baku menjadi air minum berupa pembangunan fasilitas pengolahnya beserta kelengkapan penduduknya	Wilayah Kabupaten Blora	50.000																APBD Swasta	DPUPR Dinrumkimhub PDAM		
	2. SPAM bukan jaringan perpipaan																					
	a. Penggalian atau pemanfaatan air permukaan	Wilayah yang belum terlayani jaringan perpipaan	300.000																APBD Swasta	DPUPR Dinrumkimhub PDAM		
	b. Pengeboran air tanah secara terbatas dengan mempertimbangkan kelestarian lingkungan	Wilayah yang belum terlayani jaringan perpipaan	500																APBD Swasta	DPUPR Dinrumkimhub PDAM		
6.2	Sistem Pengelolaan Air Limbah (SPAL)																					
	1. SPAL setempat berupa Pengembangan sub-sitem pengolahan setempat menggunakan metode septic tank	Seluruh kawasan perdesaan di Kabupaten Blora	1.000																APBD	DLH		
	2. SPAL terpusat berupa pemantapan dan pengembangan Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) industri untuk kegiatan industri kecil	▪ Kecamatan Cepu ▪ Kecamatan Kedungtuban ▪ Kecamatan Jepon ▪ Kecamatan Tunjungan ▪ Kecamatan Randublatung ▪ Kecamatan Kunduran ▪ Kecamatan Ngawen ▪ Kecamatan Banjarejo ▪ Kecamatan Blora	1.000																APBN APBD	Kementerian LHK DLH		
6.3	Sistem Pengelolaan Limbah B3																					
	1. Pengembangan kegiatan pengumpulan limbah B3 dengan cara <i>Landfill</i>	Seluruh kawasan yang menghasilkan limbah B3	500																APBN APBD	Kementerian LHK DLH		

NO.	PROGRAM UTAMA	LOKASI	BIAYA (JUTA RP)	WAKTU PELAKSANAAN																SUMBER DANA	INSTANSI/OPD/PIHAK PENANGGUNGJAWAB/ PELAKSANA
				2021	PJM 1					PJM 2		PJM 3			PJM 4						
					2022	2023	2024	2025	2026	2027	S/D	2031	2032	S/D	2036	2037	S/D	2041			
	2. Pengembangan sarana dan prasarana pendukung kegiatan pengumpulan limbah B3 dengan cara <i>Landfill</i>	Seluruh kawasan yang menghasilkan limbah B3	500																APBN APBD	Kementerian LHK DLH	
6.4	Sistem Jaringan Persampahan Wilayah																				
	1. Pembangunan, peningkatan, atau pemeliharaan TPS	Seluruh kecamatan di Kabupaten Blora	50.000																APBD	DPUPR Dinrumkimhub DLH	
	2. Pembangunan, peningkatan, atau pemeliharaan TPA	▪ Kecamatan Blora ▪ Kecamatan Cepu ▪ Kecamatan Randublatung ▪ Kecamatan Kunduran	150.000																APBN APBD	Kementeri PUPR DPUPR Dinrumkimhub DLH	
	3. Program pengelolaan sampah 3R;	Seluruh wilayah Kabupaten Blora	10.000																APBD	DPUPR Dinrumkimhub DLH	
	4. Optimalisasi kinerja pelayanan pengangkutan dan pengolahan sampah perkotaan	Seluruh kawasan perkotaan di Kabupaten Blora	10.000																APBD	DPUPR Dinrumkimhub DLH	
	5. Pengembangan layanan pengangkutan sampah pada wilayah kecamatan yang belum terlayani	Seluruh kawasan perkotaan di Kabupaten Blora	10.000																APBD	DPUPR Dinrumkimhub DLH	
6.5	Sistem Jaringan Drainase																				
	1. Pengembangan sistem jaringan drainase yang terintegrasi dengan sistem satuan Wilayah Sungai	Seluruh wilayah Kabupaten Blora	10.000																APBN APBD Prov APBD	Kementerian PUPR Dinas PUBMCK Prov DLH Prov DPUPR DLH	
	2. Pengembangan sistem jaringan drainase terpadu	Seluruh kawasan perkotaan yang rawan banjir di Kabupaten Blora	5.000																APBN APBD Prov APBD	Kementerian PUPR Dinas PUBMCK Prov DLH Prov DPUPR DLH	
	3. Penyusunan Rencana Induk Sistem Drainase	Seluruh wilayah Kabupaten Blora	300																APBD	DPUPR DLH	
	4. Pemeliharaan dan pembangunan prasarana drainase kawasan perkotaan	Seluruh kawasan perkotaan Kabupaten Blora	15.000																APBN APBD Prov APBD	Kementerian PUPR Dinas PUBMCK Prov DLH Prov DPUPR DLH	
	5. Normalisasi saluran sungai	Seluruh wilayah Kabupaten Blora	50.000																APBN APBD Prov APBD	Kementerian PUPR Dinas PUBMCK Prov DLH Prov DPUPR DLH	
6.6	Sistem Jaringan Evakuasi Bencana																				
	1. Pengembangan jalur evakuasi bencana	Seluruh wilayah Kabupaten Blora	15.000																APBD	DPUPR BPBD	
	2. Pengembangan ruang evakuasi bencana	Seluruh wilayah Kabupaten Blora	10.000																APBD	DPUPR BPBD	
	3. Pembangunan teknologi penanggulangan bencana	Seluruh wilayah Kabupaten Blora	10.000																APBD	DPUPR BPBD	
	4. Peningkatan dan pembangunan pos kebakaran	Seluruh wilayah Kabupaten Blora	10.000																APBD	DPUPR BPBD	
	5. Peningkatan dan pengembangan hidran	Seluruh kawasan perkotaan di Kabupaten Blora	1.000																APBD	DPUPR BPBD	
	6. Pembentukan kelompok masyarakat yang mampu melakukan pencegahan dan penanggulangan kebakaran serta bencana lainnya	Seluruh kawasan perkotaan di Kabupaten Blora	500																APBD	DPUPR BPBD	
C	PERWUJUDAN POLA RUANG																				
I	Perwujudan Kawasan Lindung																				

NO.	PROGRAM UTAMA	LOKASI	BIAYA (JUTA RP)		WAKTU PELAKSANAAN																SUMBER DANA	INSTANSI/OPD/PIHAK PENANGGUNGJAWAB/ PELAKSANA
					PJM 1						PJM 2		PJM 3		PJM 4							
					2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	S/D	2031	2032	S/D	2036	2037	S/D	2041			
1.1	Arahan Perlindungan Kawasan yang Memberikan Perlindungan terhadap Kawasan Bawahannya																					
1.1.1	Kawasan Hutan Lindung																					
	1. Pengawasan dan pemantauan untuk pelestarian kawasan hutan lindung	Kecamatan Kradenan	1.000															APBN	Kementerian LHK Perum Perhutani			
	2. Penetapan larangan untuk melakukan berbagai usaha dan/atau kegiatan yang merusak fungsi lindung	Kecamatan Kradenan	500															APBN	Kementerian LHK Perum Perhutani			
	3. Pelestarian keanekaragaman hayati dan ekosistemnya	Kecamatan Kradenan	1.000															APBN	Kementerian LHK Perum Perhutani			
	4. Percepatan reboisasi kawasan hutan lindung dengan tanaman yang sesuai dengan fungsi lindung	Kecamatan Kradenan	1.000															APBN	Kementerian LHK Perum Perhutani			
1.1.2	Kawasan Resapan Air																					
	1. Pengendalian kegiatan atau hal-hal yang bersifat menghalangi masuknya air hujan ke dalam tanah;		1.000															APBD	DPUPR DLH			
	2. Pengaturan berbagai usaha dan/atau kegiatan lahan di kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya yang dimiliki masyarakat		1.000															APBD	DPUPR DLH			
	3. Melakukan program pembinaan, penyuluhan kepada masyarakat dalam upaya pelestarian kawasan.		1.000															APBD	DPUPR DLH			
	4. Penghijauan		500															APBD	DPUPR DLH			
	5. Pengelolaan kawasan lindung yang melibatkan partisipasi dari masyarakat		1.000															APBD	DPUPR DLH			
1.2	Arahan Perlindungan Kawasan Perlindungan Setempat																					
1.2.1	Sempadan Sungai																					
	1. Penetapan pemanfaatan ruang sempadan sungai dan irigasi;	Seluruh kecamatan yang dilewati sungai dan irigasi	500															APBN APBD Prov APBD	Kementerian PUPR BBWS Dinas PUSDATARU Prov. DLH Prov. DPUPR DLH			
	2. Penertiban bangunan di atas sempadan sungai; dan	Seluruh kecamatan yang dilewati sungai	5.000															APBN APBD Prov APBD	Kementerian PUPR BBWS Dinas PUSDATARU Prov. DLH Prov. DPUPR DLH			
	3. Penghijauan	Seluruh kecamatan yang dilewati sungai	10.000															APBN APBD Prov APBD	Kementerian PUPR BBWS Dinas PUSDATARU Prov. DLH Prov. DPUPR DLH			
1.2.2	Kawasan Sekitar Waduk atau Embung																					
	1. Penetapan pemanfaatan ruang sempadan waduk atau embung;	Seluruh waduk dan embung di Kabupaten Blora	500															APBN APBD Prov APBD	Kementerian PUPR BBWS Dinas PUSDATARU Prov. DLH Prov. DPUPR DLH			
	2. Penertiban bangunan di atas sempadan waduk atau embung; dan	Seluruh waduk dan embung di Kabupaten Blora	5.000															APBN APBD Prov APBD	Kementerian PUPR BBWS Dinas PUSDATARU Prov. DLH Prov. DPUPR DLH			
	3. Penghijauan	Seluruh waduk dan embung di Kabupaten Blora	10.000															APBN APBD Prov	Kementerian PUPR BBWS			

NO.	PROGRAM UTAMA	LOKASI	BIAYA (JUTA RP)		WAKTU PELAKSANAAN																SUMBER DANA	INSTANSI/OPD/PIHAK PENANGGUNGJAWAB/ PELAKSANA
					PJM 1						PJM 2		PJM 3		PJM 4							
					2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	S/D	2031	2032	S/D	2036	2037	S/D	2041			
																			APBD	Dinas PUSDATARU Prov. DLH Prov. DPUPR DLH		
1.2.3	Ruang Terbuka Hijau																					
	1. Pembangunan, pengembangan, dan penataan RTH kota	Seluruh kawasan perkotaan di Kabupaten Blora	300																APBD	DPUPR DLH		
	2. Pengadaan tanah bagi pembangunan dan peningkatan RTH publik	Seluruh kawasan perkotaan di Kabupaten Blora	1.000																APBD	DPUPR DLH		
	3. Pengembangan jalur hijau sepanjang bahu jalan	Seluruh kecamatan di Kabupaten Blora	5.000																APBD	DPUPR DLH		
	4. Pengembangan ruang terbuka hijau pengaman lingkungan	Seluruh kecamatan di Kabupaten Blora	5.000																APBD	DPUPR DLH		
	5. Penataan makam sebagai RTH	Seluruh kecamatan di Kabupaten Blora	5.000																APBD	DPUPR DLH		
1.3	Arahan Perlindungan Kawasan Konservasi																					
1.3.1	Kawasan Cagar Alam																					
	1. Pengawasan dan pemantauan untuk pelestarian kawasan cagar alam;	▪ Cagar Alam Bekutuk di Kecamatan Randublatung ▪ Cagar Alam Cabak I/II di Kecamatan Jiken	400																APBN APBD Prov	Kementerian LHK BKSDA		
	2. Penetapan larangan untuk melakukan berbagai usaha dan/atau kegiatan;	▪ Cagar Alam Bekutuk di Kecamatan Randublatung ▪ Cagar Alam Cabak I/II di Kecamatan Jiken	400																APBN APBD Prov	Kementerian LHK BKSDA		
	3. Pelestarian keanekaragaman hayati dan ekosistemnya;	▪ Cagar Alam Bekutuk di Kecamatan Randublatung ▪ Cagar Alam Cabak I/II di Kecamatan Jiken	5000																APBN APBD Prov	Kementerian LHK BKSDA		
	4. Melakukan program pembinaan, penyuluhan kepada masyarakat dalam upaya pelestarian kawasan.	▪ Cagar Alam Bekutuk di Kecamatan Randublatung ▪ Cagar Alam Cabak I/II di Kecamatan Jiken	300																APBN APBD Prov	Kementerian LHK BKSDA		
1.4	Arahan Perlindungan Kawasan Lindung Geologi																					
1.4.1	Kawasan Cagar Alam Geologi berupa Kawasan Keunikan Bentang Alam Karst Sukolilo																					
	1. Pengendalian kegiatan yang dapat merusak bentang alam Karst Sukolilo	▪ Kecamatan Kunduran; dan ▪ Kecamatan Todanan	10.000																APBN APBD Prov	Kementerian ESDM BKSDA Dinas ESDM Prov. DLH		
	2. Melakukan program pembinaan, penyuluhan kepada masyarakat dalam upaya pelestarian kawasan	▪ Kecamatan Kunduran; dan ▪ Kecamatan Todanan	500																APBN APBD Prov	Kementerian ESDM BKSDA Dinas ESDM Prov. DLH		
1.4.2	Kawasan yang Memberikan Perlindungan Terhadap Air Tanah																					
	1. Kawasan Imbuhan Air Tanah																					
	a. Pengendalian kegiatan yang dapat menghalangi meresapnya air hujan ke kawasan resapan air tanah;	Kecamatan yang berada pada kawasan imbuhan air tanah	500																APBD	DPUPR DLH		
	b. Membatasi eksploitasi air tanah dalam secara berlebihan	Kecamatan yang berada pada kawasan imbuhan air tanah	500																APBD	DPUPR DLH		
	c. Kerjasama pengelolaan kawasan imbuhan air tanah dengan Pemerintah Daerah Lain.	Kecamatan yang berada pada kawasan imbuhan air tanah	800																APBD	DPUPR DLH		
	d. Pengelolaan kawasan imbuhan air tanah dengan melibatkan partisipasi dari masyarakat	Seluruh kecamatan di Kabupaten Blora	1.000																APBD	DPUPR DLH		
	2. Kawasan Sekitar Mata Air																					
	a. Penetapan pemanfaatan ruang pada kawasan sekitar mata air	Seluruh mata air di Kabupaten Blora	500																APBD	DPUPR DLH		
	b. Penertiban bangunan di atas kawasan sekitar mata air	Seluruh mata air di Kabupaten	1.000																APBD	DPUPR		

NO.	PROGRAM UTAMA	LOKASI	BIAYA (JUTA RP)		WAKTU PELAKSANAAN																SUMBER DANA	INSTANSI/OPD/PIHAK PENANGGUNGJAWAB/ PELAKSANA
					PJM 1						PJM 2		PJM 3			PJM 4						
					2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	S/D	2031	2032	S/D	2036	2037	S/D	2041			
		Blora																		DLH		
	c. Penghijauan	Seluruh mata air di Kabupaten Blora	10.000															APBD		DPUPR DLH		
	d. Pengelolaan kawasan sekitar mata air dengan melibatkan partisipasi masyarakat	Seluruh kecamatan	500															APBD		DPUPR DLH		
1.5	Arahan Perlindungan Kawasan Cagar Budaya																					
	1. Pelestarian bangunan cagar budaya;	Seluruh benda cagar budaya di Kabupaten Blora	10.000															APBD		DPUPR Dinporabudpar		
	2. Penetapan kawasan inti dan kawasan penyangga.	Seluruh benda cagar budaya di Kabupaten Blora	5.000															APBD		DPUPR Dinporabudpar		
II	Perwujudan Kawasan Budidaya																					
2.1	Perwujudan Kawasan Hutan Produksi																					
	1. Perlindungan dan konservasi sumber daya hutan	Seluruh kecamatan di Kabupaten Blora	1.000															APBN		Kementerian LHK Perum Perhutani		
	2. Pemanfaatan potensi sumber daya hutan	Seluruh kecamatan di Kabupaten Blora	1.000															APBN		Kementerian LHK Perum Perhutani		
	3. Pemanfaatan jarak tanaman hutan dengan pertanian hortikultura	Seluruh kecamatan di Kabupaten Blora	1.000															APBN		Kementerian LHK Perum Perhutani		
	4. Mengoptimalkan produktivitas kawasan hutan produksi pada areal tebangan hutan dengan penanaman tanaman hutan	Seluruh kecamatan di Kabupaten Blora	1.000															APBN		Kementerian LHK Perum Perhutani		
2.2	Perwujudan Kawasan Pertanian																					
2.2.1	Tanaman Pangan																					
	1. Peningkatan, perlindungan dan pengembangan kawasan dan lahan pertanian pangan berkelanjutan untuk mendukung program ketahanan pangan nasional	Seluruh kecamatan di Kabupaten Blora	300															APBD		Dintan KP		
	2. Penyediaan jaringan irigasi yang memadai	Seluruh kecamatan di Kabupaten Blora	5.000															APBD		Dintan KP		
	3. Peningkatan produktivitas, penyediaan sarana produksi, dan penanganan pasca panen	Seluruh kecamatan di Kabupaten Blora	1.000															APBD		Dintan KP		
	4. Pemulihan kerusakan lahan	Seluruh kecamatan di Kabupaten Blora	1.000															APBD		Dintan KP		
2.2.2	Hortikultura																					
	1. Peningkatan produktivitas komoditas hortikultura	Seluruh kecamatan di Kabupaten Blora	1.000															APBD		Dintan KP		
	2. Penyediaan sarana produksi dan penanganan pasca panen	Seluruh kecamatan di Kabupaten Blora	1.000															APBD		Dintan KP		
	3. Pemulihan kerusakan lahan dan pengembangan komoditas pertanian hortikultura	Seluruh kecamatan di Kabupaten Blora	1.000															APBD		Dintan KP		
	4. Pengembangan agrowisata, agroindustri dan prasarana-sarana pendukungnya.	Seluruh kecamatan di Kabupaten Blora	2.000															APBD		Dintan KP		
2.3	Perwujudan Kawasan Pertambangan																					
	1. Identifikasi potensi tambang	Seluruh kecamatan yang memiliki potensi tambang	500															APBD		DPUPR DLH		
	2. Penetapan kawasan pertambangan yang dapat dieksploitasi	Seluruh kecamatan yang memiliki potensi tambang	500															APBD		DPUPR DLH		
	3. Penanganan pasca tambang	Seluruh kecamatan yang memiliki potensi tambang	1.000															APBD		DPUPR DLH		
2.4	Perwujudan Kawasan Peruntukan Industri																					
	1. Peningkatan prasarana dan sarana kawasan peruntukan industri dan kawasan industri	▪ Kecamatan Tunjungan ▪ Kecamatan Todanan ▪ Kecamatan Sambong ▪ Kecamatan Kunduran ▪ Kecamatan Kradenan ▪ Kecamatan Kedungtuban ▪ Kecamatan Jiken ▪ Kecamatan Jepon ▪ Kecamatan Jati ▪ Kecamatan Cepu	20.000															APBD		Dinperinaker		

NO.	PROGRAM UTAMA	LOKASI	BIAYA (JUTA RP)		WAKTU PELAKSANAAN																SUMBER DANA	INSTANSI/OPD/PIHAK PENANGGUNGJAWAB/ PELAKSANA
					PJM 1						PJM 2		PJM 3		PJM 4							
					2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	S/D	2031	2032	S/D	2036	2037	S/D	2041			
		▪ Kecamatan Blora																				
	2. Peningkatan kualitas SDM lokal untuk mendukung penyediaan tenaga kerja.	▪ Kecamatan Tunjungan ▪ Kecamatan Todanan ▪ Kecamatan Sambong ▪ Kecamatan Kunduran ▪ Kecamatan Kradenan ▪ Kecamatan Kedungtuban ▪ Kecamatan Jiken ▪ Kecamatan Jepon ▪ Kecamatan Jati ▪ Kecamatan Cepu ▪ Kecamatan Blora	500																APBD	Dinperinaker		
	3. Pengembangan, penataan, dan pemantauan kawasan sentra industri kecil	▪ Kecamatan Tunjungan ▪ Kecamatan Todanan ▪ Kecamatan Sambong ▪ Kecamatan Kunduran ▪ Kecamatan Kradenan ▪ Kecamatan Kedungtuban ▪ Kecamatan Jiken ▪ Kecamatan Jepon ▪ Kecamatan Jati ▪ Kecamatan Cepu ▪ Kecamatan Blora	2.500																APBD	Dinperinaker Dindagkop UKM		
	4. Peningkatan kemampuan teknologi industri	▪ Kecamatan Tunjungan ▪ Kecamatan Todanan ▪ Kecamatan Sambong ▪ Kecamatan Kunduran ▪ Kecamatan Kradenan ▪ Kecamatan Kedungtuban ▪ Kecamatan Jiken ▪ Kecamatan Jepon ▪ Kecamatan Jati ▪ Kecamatan Cepu ▪ Kecamatan Blora	3.000																APBD	Dinperinaker		
2.5	Perwujudan Kawasan Pariwisata																					
	1. Pengembangan destinasi pariwisata	Seluruh kecamatan yang memiliki potensi wisata	500																APBD	Dinporabudpar		
	2. Penataan dan pengendalian pembangunan kawasan obyek wisata alam, wisata buatan, dan wisata budaya	Seluruh kecamatan yang memiliki potensi wisata	1.000																APBD	Dinporabudpar		
	3. Pengembangan atraksi wisata	Seluruh kecamatan yang memiliki potensi wisata	1.000																APBD	Dinporabudpar		
	4. Pengembangan desa wisata	Seluruh kecamatan yang memiliki potensi wisata	1.000																APBD	Dinporabudpar		
	5. Pengembangan pusat informasi wisata	Seluruh kecamatan yang memiliki potensi wisata	1.500																APBD	Dinporabudpar		
	6. Pengembangan pemasaran pariwisata	Seluruh kecamatan yang memiliki potensi wisata	1.000																APBD	Dinporabudpar		
2.6	Perwujudan Kawasan Permukiman																					
2.6.1	Kawasan Permukiman Perkotaan																					
	1. Penyediaan sarana, prasarana, dan utilitas permukiman perkotaan sesuai ketentuan yang dipersyaratkan	Seluruh kawasan perkotaan di Kabupaten Blora	6.000																APBD	Dinrumkimhub		
	2. Pengembangan ruang terbuka hijau minimal 30% dari luas kawasan permukiman	Seluruh kawasan perkotaan di Kabupaten Blora	5.000																APBD	Dinrumkimhub DLH		
	3. Penataan kawasan permukiman baru sesuai standar teknis yang dipersyaratkan	Seluruh kawasan perkotaan di Kabupaten Blora	500																APBD	Dinrumkimhub		
	4. Memfasilitasi perbaikan/rehabilitasi kawasan permukiman kumuh dan rumah tidak layak huni	Seluruh kawasan perkotaan di Kabupaten Blora	15.000																APBD	Dinrumkimhub DLH		
	5. Penyediaan berbagai fasilitas sosial ekonomi yang mampu mendorong perkembangan kawasan perkotaan	Seluruh kawasan perkotaan di Kabupaten Blora	3.000																APBD	Dinrumkimhub Dindagkop UKM		

NO.	PROGRAM UTAMA	LOKASI	BIAYA (JUTA RP)		WAKTU PELAKSANAAN																SUMBER DANA	INSTANSI/OPD/PIHAK PENANGGUNGJAWAB/ PELAKSANA
					PJM 1						PJM 2		PJM 3		PJM 4							
					2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	S/D	2031	2032	S/D	2036	2037	S/D	2041			
2.6.2	Kawasan Permukiman Perdesaan																					
	1. Pengembangan kawasan permukiman perdesaan yang terpadu dengan tempat usaha pertanian	Seluruh kawasan perdesaan di Kabupaten Blora	500																APBD	Dinrumkimhub		
	2. Pengembangan struktur ruang perdesaan melalui pembentukan PPL dan pengembangan keterkaitan sosial ekonomi antara PPL dengan wilayah pelayanannya	Seluruh kawasan perdesaan di Kabupaten Blora	5.000																APBD	Dinrumkimhub DPUPR		
	3. Pengembangan kawasan permukiman pedesaan yang memiliki nilai kebudayaan lokal	Seluruh kawasan perdesaan di Kabupaten Blora	500																APBD	Dinrumkimhub Dinporabudpar		
	4. Pengembangan ruang terbuka hijau permukiman pedesaan	Seluruh kawasan perdesaan di Kabupaten Blora	5.000																APBD	Dinrumkimhub DLH		
	5. Penyediaan berbagai fasilitas sosial ekonomi yang mampu mendorong perkembangan kawasan perdesaan	Seluruh kawasan perdesaan di Kabupaten Blora	5.000																APBD	Dinrumkimhub Dindagkop UKM		
2.7	Perwujudan Kawasan Pertahanan dan Keamanan																					
	1. Pemantapan kawasan/lokasi pertahanan dan keamanan pendukung perwujudan kesatuan ruang kabupaten	<ul style="list-style-type: none">Batalyon Infanteri 410/Alugoro di Kecamatan BloraKomando Distrik Militer 0721 (KODIM) di Kecamatan BloraKomando Rayon Militer (KORAMIL) di seluruh kecamatanKepolisian Resor (POLRES) di Kecamatan JeponKepolisian Sektor (POLSEK) di seluruh kecamatan	1.000																APBN	Kementerian Pertahanan POLRI		
	2. Menetapkan zona penyangga kawasan pertahanan dan keamanan yang berbahaya bagi aktivitas masyarakat	<ul style="list-style-type: none">Batalyon Infanteri 410/Alugoro di Kecamatan BloraKomando Distrik Militer 0721 (KODIM) di Kecamatan BloraKomando Rayon Militer (KORAMIL) di seluruh kecamatanKepolisian Resor (POLRES) di Kecamatan JeponKepolisian Sektor (POLSEK) di seluruh kecamatan	1.000																APBN	Kementerian Pertahanan POLRI		
D	PERWUJUDAN KAWASAN STRATEGIS KABUPATEN																					
I	Perwujudan Kawasan Strategis dari Sudut Kepentingan Pertumbuhan Ekonomi																					
1.1	Program Kawasan Strategis Kawasan Perbatasan Kecamatan Kradenan dengan Provinsi Jawa Timur																					
	1. Penyusunan Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Kabupaten	Kecamatan Kradenan	300																APBD	Bappeda DPUPR		
	2. Pengembangan prasarana dan sarana perdagangan, industri, dan jasa	Kecamatan Kradenan	500																APBD	DPUPR Dinperinaker Dindagkop UKM		
	3. Pengembangan sarana dan prasarana kawasan perbatasan	Kecamatan Kradenan	500																APBD	DPUPR Dinrumkimhub		
	4. Peningkatan kerjasama antar wilayah daerah perbatasan	Kecamatan Kradenan	100																APBD	Bappeda DPUPR		
1.2	Program Kawasan Strategis Kawasan Pertumbuhan Cepat yang dilalui akses Purwodadi-Kunduran-Ngawen-Blora-Jepon-Jiken-Sambong-Cepu dan Wirosari-Jati-Randublatung-Kedungtuban-Cepu																					
	1. Penyusunan Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Kabupaten	Seluruh kecamatan yang masuk Kawasan Pertumbuhan Cepat	300																APBD	Bappeda DPUPR		
	2. Pengembangan prasarana dan sarana perdagangan, industri, dan jasa	Seluruh kecamatan yang masuk Kawasan Pertumbuhan Cepat	500																APBD	DPUPR Dinperinaker Dindagkop UKM		
	3. Pengembangan sektor ekonomi perkotaan formal dan informal	Seluruh kecamatan yang masuk	500																APBD	DPUPR		

NO.	PROGRAM UTAMA	LOKASI	BIAYA (JUTA RP)		WAKTU PELAKSANAAN																SUMBER DANA	INSTANSI/OPD/PIHAK PENANGGUNGJAWAB/ PELAKSANA
					PJM 1						PJM 2		PJM 3		PJM 4							
					2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	S/D	2031	2032	S/D	2036	2037	S/D	2041			
	dalam satu kesatuan pengembangan	Kawasan Pertumbuhan Cepat																		Dinrumkimhub		
	4. Pengendalian alih fungsi lahan pertanian sawah	Seluruh kecamatan yang masuk Kawasan Pertumbuhan Cepat	300																APBD	Bappeda Dintan KP		
1.3	Program Kawasan Strategis Kawasan Desa Potensial Berkembang yang Memiliki Pengaruh Perkembangan Eksternal terhadap Desa-Desa di Sekitarnya yang Ditetapkan dalam PPL																					
	1. Penyusunan Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Kabupaten	Seluruh kecamatan yang masuk dalam Kawasan Desa Potensial Berkembang	300																APBD	Bappeda DPUPR		
	2. Pengembangan prasarana dan sarana kawasan perdesaan dan kawasan pertanian	Seluruh kecamatan yang masuk dalam Kawasan Desa Potensial Berkembang	500																APBD	DPUPR Dintan KP		
	3. Pengembangan sektor ekonomi formal dan informal yang mampu mendorong perkembangan kawasan perdesaan	Seluruh kecamatan yang masuk dalam Kawasan Desa Potensial Berkembang	500																APBD	DPUPR Dindagkop UKM		
	4. Pengendalian alih fungsi lahan pertanian sawah	Seluruh kecamatan yang masuk dalam Kawasan Desa Potensial Berkembang	300																APBD	Bappeda Dintan KP		
II	Perwujudan Kawasan Strategis dari Sudut Kepentingan Sosial Budaya berupa Kawasan Lingkungan Permukiman Sedulur Sikep																					
	1. Penyusunan Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Kabupaten	▪ Kecamatan Banjarejo ▪ Kecamatan Sambong ▪ Kecamatan Kradenan ▪ Kecamatan Randublatung	300																APBD	Bappeda DPUPR		
	2. Pengembangan kawasan permukiman yang memiliki nilai-nilai budaya lokal	▪ Kecamatan Banjarejo ▪ Kecamatan Sambong ▪ Kecamatan Kradenan ▪ Kecamatan Randublatung	1.000																APBD	Bappeda Dirumkimhub Diinporabudpar		
	3. Memfasilitasi perbaikan/rehabilitasi kawasan permukiman kumuh dan tidak layak huni	▪ Kecamatan Banjarejo ▪ Kecamatan Sambong ▪ Kecamatan Kradenan ▪ Kecamatan Randublatung	5.000																APBD	DPUPR Dinrumkimhub		
	4. Penyediaan sarana dan prasarana dasar lingkungan permukiman	▪ Kecamatan Banjarejo ▪ Kecamatan Sambong ▪ Kecamatan Kradenan ▪ Kecamatan Randublatung	5.000																APBD	DPUPR Dinrumkimhub		
	5. Pelestarian adat istiadat, tradisi, dan cagar budaya	▪ Kecamatan Banjarejo ▪ Kecamatan Sambong ▪ Kecamatan Kradenan ▪ Kecamatan Randublatung	5.000																APBD	Diinporabudpar		
	6. Pengembangan ruang terbuka hijau permukiman	▪ Kecamatan Banjarejo ▪ Kecamatan Sambong ▪ Kecamatan Kradenan ▪ Kecamatan Randublatung	1.000																APBD	Dinrumkimhub DLH		
	7. Pengembangan desa wisata yang mengangkat nilai-nilai budaya lokal	▪ Kecamatan Banjarejo ▪ Kecamatan Sambong ▪ Kecamatan Kradenan ▪ Kecamatan Randublatung	1.000																APBD	Dinporabudpar		
III	Perwujudan Kawasan Strategis dari Sudut Kepentingan Pendayagunaan Sumber Daya Alam dan/atau Teknologi Tinggi berupa Kawasan Blok Cepu dan Blok Blora																					
	1. Penyusunan Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Kabupaten	Seluruh kecamatan yang masuk dalam Blok Blora dan Blok Cepu	300																APBD	Bappeda DPUPR		
	2. Eksplorasi dan eksploitasi minyak dan gas bumi yang mempertimbangkan kaidah lingkungan	Seluruh kecamatan yang masuk dalam Blok Blora dan Blok Cepu	10.000																APBD Swasta	DPUPR PT. Pertamina Swasta		
	3. Penyediaan sarana dan prasarana eksploitasi dan eksplorasi minyak dan gas bumi	Seluruh kecamatan yang masuk dalam Blok Blora dan Blok Cepu	5.000																APBD Swasta	DPUPR PT. Pertamina Swasta		

NO.	PROGRAM UTAMA	LOKASI	BIAYA (JUTA RP)		WAKTU PELAKSANAAN																SUMBER DANA	INSTANSI/OPD/PIHAK PENANGGUNGJAWAB/ PELAKSANA
					PJM 1						PJM 2		PJM 3		PJM 4							
					2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	S/D	2031	2032	S/D	2036	2037	S/D	2041			
	4. Penyediaan jaringan pipa untuk keperluan tambang minyak dan gas bumi	Seluruh kecamatan yang masuk dalam Blok Blora dan Blok Cepu	10.000															APBD Swasta	DPUPR PT. Pertamina Swasta			
	5. Peningkatan kemampuan teknologi untuk mendukung kegiatan penambangan minyak dan gas bumi yang ramah lingkungan	Seluruh kecamatan yang masuk dalam Blok Blora dan Blok Cepu	5.000															APBD Swasta	DPUPR PT. Pertamina Swasta			
IV	Perwujudan Kawasan Strategis dari Sudut Kepentingan Fungsi dan Daya Dukung Lingkungan Hidup																					
4.1	Program Kawasan Strategis Kawasan Prioritas yang Digunakan Melindungi Sumber Air yang ada Di Daerah Merupakan Daerah yang Dilewati oleh Sungai Bengawan Solo dan Sungai Lusi																					
	1. Penyusunan Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Kabupaten	Seluruh kecamatan yang masuk dalam daerah perlindungan Sungai Bengawan Solo dan Sungai Lusi	300															APBD	Bappeda DPUPR			
	2. Perlindungan Daerah yang dilewati oleh Sungai Bengawan Solo dan Sungai Lusi terhadap kegiatan budidaya yang dapat merusak lingkungan	Seluruh kecamatan yang masuk dalam daerah perlindungan Sungai Bengawan Solo dan Sungai Lusi	1.000															APBD	DPUPR DLH			
	3. Pengaturan pemanfaatan ruang	Seluruh kecamatan yang masuk dalam daerah perlindungan Sungai Bengawan Solo dan Sungai Lusi	1.000															APBD	DPUPR DLH			
4.2	Program Kawasan Strategis Kawasan Rawan Bencana Alam Kekeringan																					
	1. Penyusunan Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Kabupaten	<div><div>▪ Kecamatan Banjarejo;</div><div>▪ Kecamatan Blora;</div><div>▪ Kecamatan Bogorejo;</div><div>▪ Kecamatan Cepu;</div><div>▪ Kecamatan Japah;</div><div>▪ Kecamatan Jati;</div><div>▪ Kecamatan Jepon;</div><div>▪ Kecamatan Jiken;</div><div>▪ Kecamatan Kedungtuban;</div><div>▪ Kecamatan Kradenan;</div><div>▪ Kecamatan Kunduran;</div><div>▪ Kecamatan Ngawen;</div><div>▪ Kecamatan Randublatung;</div><div>▪ Kecamatan Todanan; dan</div><div>▪ Kecamatan Tunjungan.</div></div>	300															APBD	Bappeda DPUPR			
	2. Penyuluhan terhadap masyarakat mengenai bencana kekeringan	<div><div>▪ Kecamatan Banjarejo;</div><div>▪ Kecamatan Blora;</div><div>▪ Kecamatan Bogorejo;</div><div>▪ Kecamatan Cepu;</div><div>▪ Kecamatan Japah;</div><div>▪ Kecamatan Jati;</div><div>▪ Kecamatan Jepon;</div><div>▪ Kecamatan Jiken;</div><div>▪ Kecamatan Kedungtuban;</div><div>▪ Kecamatan Kradenan;</div><div>▪ Kecamatan Kunduran;</div><div>▪ Kecamatan Ngawen;</div><div>▪ Kecamatan Randublatung;</div><div>▪ Kecamatan Todanan; dan</div><div>▪ Kecamatan Tunjungan.</div></div>	500															APBD	DPUPR BPBD			
	3. Penghijauan	<div><div>▪ Kecamatan Banjarejo;</div><div>▪ Kecamatan Blora;</div><div>▪ Kecamatan Bogorejo;</div><div>▪ Kecamatan Cepu;</div></div>	500															APBD	DPUPR DLH			

NO.	PROGRAM UTAMA	LOKASI	BIAYA (JUTA RP)	WAKTU PELAKSANAAN																SUMBER DANA	INSTANSI/OPD/PIHAK PENANGGUNGJAWAB/ PELAKSANA
				PJM 1						PJM 2		PJM 3		PJM 4							
				2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	S/D	2031	2032	S/D	2036	2037	S/D	2041			
		<div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div>																			
4.3	Program Kawasan Strategis Kawasan Lahan Kritis																				
	1. Penyusunan Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Kabupaten	Seluruh kecamatan di Kabupaten Blora	300															APBD	Bappeda DPUPR		
	2. Rehabilitasi kawasan lahan kritis	Seluruh kecamatan di Kabupaten Blora	5.000															APBD	DLH		
	3. Perlindungan sumber-sumber air untuk menghidupkan lahan kritis kembali	Seluruh kecamatan di Kabupaten Blora	1.000															APBD	DLH		
	4. Pengoptimalan pemanfaatan lahan sebagai kawasan hutan atau kawasan resapan air	Seluruh kecamatan di Kabupaten Blora	1.000															APBD	DLH		
	5. Penanganan, pemantauan dan evaluasi penanganan lahan kritis	Seluruh kecamatan di Kabupaten Blora	300															APBD	DPUPR DLH		

BUPATI BLORA,

Cap Ttd.

ARIEF ROHMAN